

## **EKSISTENSI KOPERASI WANITA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT**

**Syahriyah Semaun**

**syahriyah.semaun@gmail.com**

**Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare**

**Abstract:** *The existence of women's cooperatives in Indonesia is significant even though there are not many large female cooperatives, but women's cooperatives are capable of assisting the government in overcoming national problems such as reducing unemployment, improving health, improving education and addressing gender issues. Cooperatives are a place for women to improve their family economy, self-actualization for women. Women are no longer just housewives but cooperatives have proven their superiority in empowering women as pioneers in helping micro-businesses in their region. Therefore women's cooperatives need to be grown and encouraged.*

**Keywords:** women, economic, cooperatives

### **Pendahuluan**

Salah satu kegiatan pemberdayaan perempuan yang dilakukan melalui sektor ekonomi adalah usaha koperasi. Koperasi yang selama ini dikenal sebagai pilar dari perekonomian bangsa merupakan pilihan tepat bagi kaum perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga maupun masyarakat. Persoalan perempuan miskin adalah persoalan struktural dengan faktor penyebab dan kendala yang tidak tunggal. Kemiskinan perempuan dapat ditelaah melalui dua hal yaitu, perspektif ekonomi, dimana kemiskinan dan pemiskinan perempuan secara jelas terlihat dari sektor ekonomi. Perempuan yang hidup dalam kemiskinan selalu kesulitan untuk mendapatkan akses sumber daya ekonomi. Untuk bekerja mereka sering tidak diakui dan dihargai. Dalam bekerja pun, perempuan mendapat upah

jauh lebih rendah dari apa yang diperoleh laki-laki. Seorang perempuan yang turut mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau yang menjadi kepala keluarga dari kelompok miskin, lebih miskin dibandingkan laki-laki dari kategori yang sama. Perempuan yang tidak memiliki penghasilan jauh lebih buruk situasinya dibandingkan dengan perempuan yang mempunyai penghasilan dalam keluarga dengan tingkat ekonomi yang subsistem. Perempuan mengalokasikan sebagian besar penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga dan lebih mementingkan kebutuhan dasar keluarganya dibandingkan laki-laki. Secara adil harus diakui perempuan memiliki jam kerja lebih panjang daripada laki-laki untuk pekerjaan yang dibayar maupun tidak dibayar, dibandingkan dengan laki-laki pada usia yang sama.

Kedua dari perspektif politik, perempuan tidak terwakili secara proporsional diantara kelompok miskin dan tidak memiliki kekuasaan. Kemiskinan perempuan antara lain kerentanan hidup (*vulnerability*), kesempatan dan suara (*voicelessness and powerlessness*) serta didukung pemerintah yang sangat bias gender (*male - biased governance system*). Dimensi kemiskinan gender mudah ditemui dalam kebijakajn struktural, perbedaan efek kebijakan dan dana yang tidak memadai untuk mendukung kebijakan yang merugikan kaum perempuan, sehingga diskriminasi terhadap perempuan sangat kentel. Perempuan sangat rentan terhadap kekerasan, terutama kekerasan *domestic (domrstic violence)*. Secara fisik tubuh perempuan lebih rentan dan lebih lemah dibandingkan laki-laki, sehingga kualitas hidup juga perempuan juga lebih rendah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Imam Cahyono, *Wajah Kemiskinan, Wajah Perempuan*, Jurnal Perempuan No. 42, Yayasan Jurnal Perempuan Juli 2015. Lihat pula; Muhammad Kamal Zubair, "Prospek Program Studi Perbankan Syariah." DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 16.1 (2018), h. 33.

Rendahnya gaji atau upah yang diterima oleh perempuan tidak terlepas dari pandangan patriarkis bahwa perempuan kurang produktif jika dibandingkan dengan laki-laki. Dimana laki-laki sebagai kepala rumah tangga dibayar dengan upah keluarga yaitu upah yang meliputi kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri, isteri dan anak-anaknya. Sebaliknya perempuan yang melakukan kerja produktif hanyalah member tambahan pendapatan keluarga dan oleh karena dapat diberi upah yang kurang daripada pekerja laki-laki, bahkan untuk pekerjaan yang sama nilainya.<sup>2</sup>

Adapun bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang memiskinkan perempuan adalah sebagai berikut :

a. *Marginalisasi* (Peminggiran) ekonomi

Salah satu bentuk peminggiran ekonomi perempuan adalah lemahnya kesempatan perempuan terhadap sumber-sumber ekonomi. Perempuan sering ditinggalkan dalam upaya pengembangan ekonomi karena anggapan bahwa tugasnya adalah dirumah dan tidak menanggung beban keluarga dirumah.

b. *Subordinasi* (penomorduaan)

*Subordinasi* terhadap perempuan bermakna pada perempuan tidak memiliki peluang untuk mengambil keputusan bahkan yang menyangkut dirinya. Perempuan diharuskan tunduk pada keputusan yang diambil oleh laki-laki. Penempatan perempuan dirumah dan memberikan kesempatan lebih pada laki-laki untuk sekolah adalah bentuk *subordinasi*. Dalam masyarakat, perempuan dianggap terlalu lemah untuk memimpin satu kelompok masyarakat, atau memerintah suatu negara.

---

<sup>2</sup> Kamla Bhasin, *Memahami Gender*, (Jakarta: Teplok Press, 2011) hal. 27

c. Beban Kerja berlebih.

Dalam suatu masyarakat pembagian peran dibagi menjadi produktif, reproduktif, memelihara masyarakat dan politik masyarakat. Perempuan umumnya memiliki tiga peran yang lebih dominan yaitu produktif, dan produktif. Laki-laki hanya produktif dan sedikit reproduktif. Akibat beban pekerjaan yang berat ini, perempuan tidak memiliki waktu untuk membicarakan hal-hal diluar rutinitasnya seperti membaca koran, mendengarkan informasi atau hadir dalam pertemuan masyarakat.

d. *Stereotipe* (Di cap negatif)

Perempuan sering digambarkan pada bentuk-bentuk yang belum tentu benar, seperti sering digambarkan emosional, lemah, tidak mampu memimpin dan tidak rasional sehingga menutup kesempatan perempuan diberbagai bidang, baik ekonomi, politik maupun budaya.

e. Kekerasan.

Bentuk kekerasan dapat berupa fisik maupun psikologis seperti perkosaan, serangan fisik, pelacuran, pornografi dan pelecehan seksual. Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah yang kompleks terjadi karena sebuah konstruksi sosial dan sering kali dibudayakan dalam masyarakat. Perempuan menjadi rentan terhadap tindak kekerasan karena posisinya yang timpang dalam masyarakat dan institusi perkawinan baik secara ekonomi, sosial, politik maupun emosional.<sup>3</sup>

Ketimpangan gender dalam seluruh aspek kehidupan merupakan kondisi utama yang menghantarkan perempuan pada kemiskinan yang

---

<sup>3</sup> Kamla Bhasin dan Nighat Said Kelana Khan. Persoalan pokok mengenai feminisme dan relevansinya, alih bahasa S, Helina, (Jakarta: PT, Gramedia Pustaka Utama 2011), hal 24-25

berkepanjangan. Untuk menjaga kesangsungan hidup keluarganya, sebagiam kaum perempuan melibatkan diri dalam berbagai usaha yang produktif ada pula yang bergabung dalam wadah memiliki legalitas seperti koperasi. Koperasi menciptakan peluang bagi perempuan untuk membantu diri sendiri. Basis demokrasi dan kombinasi tujuan sosial ekonomi yang unik, memenmpatkan koperasi sebagai lembaga ideal yang berperan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>4</sup> Sifat keanggotaan koperasi adalah bebas, sukarela, dan terbuka. Ini berarti bahwa seorang menjadi anggota koperasi berdasarkan kesadaran dan kebebasan yang apa adanya, tanpa ada paksaan dari siapapun juga. Selain itu, asas persamaan di antara sesama anggota tetap dipertahankan di dalam koperasi, tanpa mengadakan perbedaan di antara anggota yang berlainan keturunan, paham politik, dan agama. Sebenarnya anggota-anggota itulah yang memiliki koperasi secara bersama-sama. Maju mundurnya koperasi itu pun sebagian besar tergantung dari kegiatan-kegiatan anggota-anggota itu sendiri. Oleh karena anggota-anggota (calon anggota) mendirikan koperasi terutama untuk keperluan mereka sendiri, maka koperasi pun dalam pekerjaan sehari-hari berusaha melayani anggota-anggota dengan sebaik-baiknya. Untuk memperluas jumlah anggota perlu berpedoman pada sikap seseorang memandang organisasi yaitu bergantung pada persepsi orang itu sendiri terhadap organisasi.

### **Peran Koperasi Wanita dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat**

Eksistensi dan keberhasilan koperasi tidak dapat terkonstruk jika keberadaannya tidak diterima oleh masyarakat. Akseptabilitas masyarakat dapat dilihat dari bagaimana masyarakat menjadi bagian yang senyawa

---

<sup>4</sup> Arifinal Chaniago, *Perkoperasian Indonesia*, (Bandung: Angkasa 2013). hal 37

dengan koperasi.<sup>5</sup> Kebersatuan masyarakat sebagai anggota koperasi merupakan wujud kepercayaan mereka kepada pengurus koperasi dan sebaliknya. Dalam konteks ini, prinsip mutualistik dan saling membutuhkan, baik materi atau non materi, menggambarkan hubungan pertukaran yang terbentang mulai dari yang paling tidak jelas pengukurannya sampai dengan yang jelas pengukurannya, mulai dari yang langsung sampai ke yang tidak langsung. Hubungan yang diikat oleh *trust* antara koperasi dengan anggotanya terbangun jika kedua belah pihak saling memenuhi ekspektasi dari keduanya. Anggota akan percaya terhadap koperasi jika koperasi mampu memenuhi ekspektasi kebutuhan anggotanya melalui mekanisme yang memenuhi prinsip-prinsip perkoperasian yang menjadi kesepakatan. Koperasi akan dipercaya oleh anggotanya jika harapan-harapan anggotanya dapat dipenuhi tanpa membedakan apapun, termasuk perbedaan jenis kelamin. Begitu juga koperasi eksis, bertahan, dan berkembang jika anggotanya memenuhi kewajiban-kewajibannya. Eksistensi Koperasi wanita dapat digambarkan dari bagaimana eksistensi bahkan kemajuan yang telah dicapai oleh dua kopwan yang ada di Pulau Jawa, yaitu;

1. Koperasi Setia Bhakti Wanita (KSBW) di Surabaya
2. Kopwan Kartika Chandra Pandaan (KCP).

Keberhasilan Koperasi wanita yang pertama, antara lain, ditentukan oleh sistem tanggung renteng dalam pengelolaan dana bergulir. Keberhasilan yang dicapai tersebut telah mendorong Kementerian Negara Koperasi dan UKM untuk mereplikasikan sistem tanggung renteng kepada 30 kelompok di 30 provinsi di Indonesia dengan menyediakan dana bergulir sebesar Rp. 225

---

<sup>5</sup>Sudirman, L., Damirah Damirah, and I. Nyoman Budiono. "Pengembangan Minat Berwirausaha Pada Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare." DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 16.1 (2018): 16-31.

juta atau Rp. 7,5 juta per kelompok. Sedangkan Koperasi wanita yang nomor dua dinilai berhasil karena sehatnya pengelolaan dan besarnya omset. Indikator keberhasilannya dapat dilihat melalui kepemilikan supermarket, kenaikan simpan-pinjam, kepemilikan pertokoan, persewaan dan sebagainya.<sup>6</sup> Dalam konteks kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, peranan wanita menjadi sangat penting karena koperasi dapat menjadi salah satu wadah yang sangat strategis untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, di samping kegiatan koperasi juga dapat dijadikan sebagai media aktualisasi diri wanita. Wanita dan koperasi memiliki kaitan yang erat, karenanya, peranan wanita perlu ditingkatkan secara terus menerus dengan beberapa alasan, yaitu:

- a. Wanita merupakan aktor yang penting dalam kaitan dengan program pengentasan kemiskinan.
- b. Wanita merupakan aktor penting dan terlibat langsung dalam kaitan dengan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- c. Wanita sebagai individu membutuhkan media dalam kaitan dengan aktualisasi diri agar dapat berperan lebih besar dari sekadar sebagai ibu rumah tangga.<sup>7</sup>

Kaitan antara wanita dan koperasi, karenanya, kerap memunculkan pertanyaan yang menarik bahwa apakah kaum wanita (sebagai kategori sosial) mempunyai kekuatan atau potensi tertentu sehingga koperasi yang dikelola wanita dapat berjalan lebih baik atau tidak. Pertanyaan ini secara

---

<sup>6</sup> Hasil pendataan Kopwan yang Responsif gender tahun 2018, Kementerian Negara, Koperasi dan UKM

<sup>7</sup> Indah Anisykurlillah, Lyna Latifah, Model Pemberdayaan Koperasi Wanita sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. 2017

sekilas dapat dijawab dengan melihat keberadaan koperasi wanita secara nasional melalui sejumlah peubah yang meliputi unsur-unsur ;

- a) Jumlah Koperasi Wanita
- b) jumlah anggota Koperasi wanita.
- c) Jenis usaha Koperasi Wanita
- d) Pelaksanaan RAT
- e) Modal Koperasi Wanita
- f) Volume usaha
- g) Sisa Hasil Usaha (SHU)
- h) Umur Koperasi Wanita
- i) Jumlah manajer
- j) j, Jumlah karyawan.
- k) Keuangan/solvabilitas.<sup>8</sup>

Beberapa unsur perubah di atas tentu menjadi indikator yang dapat menunjukkan bahwa kemampuan dan keuletan yang melekat dalam diri wanita cukup memberikan jawaban atas kegelisahan banyak pihak, dan sekaligus di sinilah urgensi eksistensial koperasi yang berada di bawah kendali para wanita. Apalagi, saat ini peranan pemerintah dalam melindungi koperasi dari hambatan kekuatan yang besar dan jaringan yang kokoh, sehingga memungkinkan koperasi dan anggotanya bisa hidup sejahtera. Dengan demikian, koperasi yang memiliki usaha kecil, mikro dan menengah yang bagus diharapkan akan mampu bersaing. Koperasi wanita tidak saja

---

<sup>8</sup> Syahriyah Semaun, *Eksistensi Koperasi Wanita Dalam Menghadapi Era Globalisasi*. Jurnal Al-Mai'iyah. Volume 03 No. 1 Oktober 2010



menguntungkan pada anggota koperasi tetapi juga telah berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik pada masyarakat. Keberadaan dan perkembangan koperasi khususnya koperasi yang dikelola wanita di Indonesia cukup menarik perhatian pemerintah maupun para pembina koperasi. Koperasi wanita yang berkembang dan konsisten dalam menjalankan prinsip dan nilai-nilai koperasi, pada umumnya memiliki kegiatan yang diorientasikan kepada pemenuhan kebutuhan dan pemecahan persoalan wanita, baik yang bersifat konsumtif, produktif maupun kesehatan reproduksi.

Pemerintah dan berbagai pihak terus memberi dukungan kuat pada kegiatan pemberdayaan kaum perempuan Indonesia. Dukungan tersebut dilakukan melalui banyak sektor, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Upaya ini dimaksudkan agar makin menguatkan kemandirian kaum perempuan, termasuk dalam memberikan sumbangsihnya pada upaya meningkatkan derajat perekonomian dan kesejahteraan keluarga. Koperasi yang dikelola dan beranggotakan kaum perempuan dinilai potensial menjadi basis pengembangan kewirausahaan di Indonesia. Berdasarkan Online Data System (ODS) Kementerian Koperasi dan UKM hingga 20 April 2018 terdapat 13.212 unit koperasi wanita yang aktif dan 4.631 telah mendapatkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK).<sup>9</sup> Koperasi perempuan merupakan wadah yang paling tepat bagi kelompok perempuan pelaku usaha produktif dari sini dapat dikembangkan pusat-pusat kewirausahaan baru. Koperasi Wanita diharapkan mampu menjadi pilihan perempuan pelaku UMKM untuk mendapatkan fasilitasi dan dukungan. Selain mudah untuk bergabung menjadi anggota dan

---

<sup>9</sup> Data dari rekapitulasi data kopwan berdasarkan jenis per 30 April 2018, Kementerian Negara, Koperasi dan UKM

mendapatkan fasilitas, koperasi yang dikelola oleh perempuan memberikan fasilitasi pembinaan dan pengawasan bagi anggota koperasi yang tujuannya untuk memberdayakan perempuan yang berwirausaha sebagai pahlawan ekonomi masyarakat dalam era modern saat ini. Penguatan terhadap koperasi wanita sebagai pusat pengembangan kewirausahaan, dapat dilakukan dari sisi pemberian fasilitas berupa pendidikan dan pelatihan. Konkretnya anggota koperasi wanita perlu dibekali kemampuan khususnya kewirausahaan bagi anggota, antara lain perubahan pola pikir, rencana bisnis, kelayakan bisnis, keberlanjutan bisnis, manajemen risiko, hingga strategi bersaing dengan kompetitor.

Keberadaan koperasi wanita di Indonesia harus terus diperkuat terutama dalam mendorong kemajuan perekonomian masyarakat. Sebagai lembaga keuangan mikro, koperasi wanita turut berperan dalam meningkatkan akses masyarakat kecil terhadap permodalan secara cepat, murah dan tanpa agunan. Saat ini, bantuan permodalan yang diperoleh oleh satu koperasi di desa sebesar Rp 25 juta. Dengan asumsi 1 koperasi beranggotakan 20 usaha mikro dengan masing-masing menyerap 3 orang, maka jumlah tenaga kerja yang terserap adalah 630.360 orang. Hal ini sangat membantu terutama dalam mengatasi masalah pengangguran. Saat ini terdapat 3 permasalahan dalam bidang UMKM dan koperasi, yakni Sumber Daya Manusia (SDM), modal, dan pasar. Untuk mengatasinya diperlukan langkah-langkah strategis dan terencana. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas produk, dalam hal ini *packaging*-nya serta mendorong pemasarannya. Keberadaan koperasi wanita terus didukung, terutama pula dari sistem perbankan. Ada beberapa rekomendasi, seperti pengembangan jaringan usaha, membentuk forum atau pusat koperasi wanita di tingkat

kab/provinsi, serta perlu adanya evaluasi terhadap program yang kurang bersinergi dengan program lain.

### **Pemberdayaan Koperasi Wanita**

Dalam kaitan dengan pemberdayaan dan peningkatan peranan wanita dalam Laporan akhir koperasi, Pemerintah khususnya Kementerian Negara Koperasi dan UKM—sejak tahun 1980 sampai dengan sekarang--telah melaksanakan berbagai program. Salah satunya adalah Program Peningkatan Peran Perempuan melalui Koperasi dan UKM. Anggota Kopwan dari 33 provinsi di Indonesia berjumlah 290.740 orang. Ratarata jumlah anggota per koperasi sebanyak 165 orang. Jumlah anggota Kopwan terbesar antara 40–200 orang yaitu kurang lebih sekitar 71%. Terdapat kecenderungan bahwa Kopwan yang berjumlah anggota besar (lebih di atas 180 anggota kopwan) persentasenya kecil yang berarti bahwa jika skala Kopwan ditentukan berdasarkan jumlah anggotanya, maka jumlah Kopwan dengan skala yang besar persentasenya kecil. Hal ini sesuai dengan keadaan lapangan bahwa jumlah anggota Kopwan memang relatif sedikit dibanding dengan koperasi biasa. Sekalipun jumlahnya sedikit, namun pelayanan koperasi tetap konsisten dan berkelanjutan sehingga ukuran jumlah anggota yang besar bukan merupakan indikator keberhasilan koperasi yang memadai. Dengan kata lain jumlah Kopwan yang berhasil menjadi besar (dari sisi jumlah anggotanya) di Indonesia kecil jumlahnya. Dari total jumlah Kopwan yang ada, maka jenis kegiatan Kopwan yang terbanyak adalah jenis kegiatan simpan pinjam sebanyak 65%, usaha serba usaha (22%), konsumsi (4%), produksi (1%), dan 8% lainnya tidak memberikan data.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Data dari rekapitulasi data kopwan berdasarkan jenis per 30 April 2018, Kementerian Negara, Koperasi dan UKM

Pengamatan lapangan menunjukkan bahwa pada umumnya Kopwan mengawali kegiatannya dengan unit simpan pinjam. Kemudian Kopwan mengembangkan usahanya ke serba usaha dengan berbagai kegiatan, seperti pengadaan berbagai kebutuhan pokok dalam waserda, usaha produksi (misalnya batik) dan kredit konsumsi (kredit yang lebih khusus untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak sekolah, sakit), kegiatan jasa (pendidikan; pendirian TK/Taman Kanak-kanak). Kecenderungan jenis usaha tersebut menunjukkan tidak saja jenis usaha simpan pinjam secara ekonomi menguntungkan tetapi juga sekaligus menggambarkan kebutuhan riil dari sebagian besar perempuan anggota koperasi. Komitmen pemerintah untuk mengembangkan dan memperkuat Kopwan melalui usaha simpan pinjam sangat tepat dalam rangka mengerakkan ekonomi di tingkat paling bawah. Namun komitmen itu harus benar-benar diwujudkan dan mengikuti perkembangan Kopwan. Karena keberhasilan tidak boleh mendadak jika Laporan akhir Kopwan selama ini tumbuh secara alami dan tahan terpaan krisis. Pemerintah, karenanya, hendaknya membuat kebijakan-kebijakan yang tepat untuk mendorong pertumbuhan yang lebih berakar dan kuat melalui perencanaan yang matang.

Data temuan diketahui bahwa masih banyak Kopwan yang belum mampu melaksanakan RAT karena skala usahanya masih kecil. Alasan lain adalah selain karena penyelenggaraan RAT membutuhkan biaya yang cukup besar juga karena sebagian Kopwan memang kurang disiplin untuk mentaati aturan RAT tersebut. Di satu sisi RAT merupakan petunjuk berjalannya roda organisasi, dan itulah sebabnya indikator ini menjadi status keaktifan koperasi sebagaimana halnya koperasi lain, sementara di sisi lain masih banyak

Kopwan yang belum melakukan RAT. Bagi yang belum melaksanakan RAT perlu diketahui dan dibina agar melakukan RAT.<sup>11</sup>

Secara umum, modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal dari luar. Berdasarkan hasil pendataan ini memperlihatkan bahwa total modal Kopwan dari 33 propinsi berjumlah Rp. 1,9 trilyun (modal sendiri dan modal luar). Jumlah tersebut terdiri dari total modal sendiri berjumlah Rp. 926.056.204.000 atau (51,24%), dan total modal dari luar berjumlah Rp. 905.507.288.000 atau sebesar (48,76%). Sedangkan total volume usaha seluruh Kopwan di 31 provinsi sebesar Rp. 1.401 trilyun. Volume usaha rata-rata per koperasi Rp. 1,856 juta. Persentase tertinggi (kurang lebih 21%) adalah Kopwan dengan besaran volume usaha Rp. 20 juta, Rp. 40 juta (sekitar 14%) dan volume usaha lebih dari Rp. 560 jutaan sebesar (12%). Sementara persentase volume usaha Kopwan lainnya sangat variatif berkisar antara Rp. 60 jutaan-Rp. 560 jutaan.<sup>12</sup> Dengan gambaran besaran volume usaha yang dimiliki Kopwan tersebut, maka sebagian besar Kopwan dapat digolongkan sebagai pengusaha mikro.

Secara kuantitatif, menggambarkan bahwa rentabilitas idealnya dapat menunjukkan kemampuan Kopwan untuk dapat menghasilkan keuntungan. Rentabilitas Kopwan rata-rata sebesar 5-10 persen (60%). Hal tersebut membuktikan bahwa kemampuan Kopwan untuk dapat menghasilkan keuntungan masih sangat rendah. Kondisi Kopwan yang ada saat ini cenderung berjalan namun tidak memberikan akumulasi keuntungan yang besar bagi Kopwan. Dalam jangka panjang hal ini penting menjadi perhatian tidak hanya secara internal untuk Kopwan tetapi juga untuk pembina

---

<sup>11</sup> Hasil pendataan Kopwan yang Responsif gender tahun 2018, Kementerian Negara, Koperasi dan UKM

<sup>12</sup> Data dari rekapitulasi data kopwan berdasarkan jenis per 30 April 2018, Kementerian Negara, Koperasi dan UMKM

koperasi dan lembaga yang berkompeten membinanya. Karenanya, perlu dilakukan pelatihan-pelatihan tentang pengembangan usaha sehingga kemampuan Kopwan untuk mengembangkan usaha dapat ditingkatkan dari kondisi saat ini. Koperasi wanita ini telah memberikan dampak positif bagi anggota. Selain memberikan kontribusi terhadap pengembangan modal, volume usaha juga berdampak positif bagi sumber daya manusia baik pengurus, karyawan maupun anggotanya. Selain itu koperasi wanita ini juga berdampak sebagai wadah pembelajaran dan lahirnya pemimpin formal dari koperasi ini.

Perempuan, yang berjumlah separuh dari penduduk Indonesia, memiliki potensi yang harus dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa. Potensi dan peran perempuan bukan sesuatu yang masih diperdebatkan karena sejak seratus tahun yang lalu perempuan Indonesia telah ikut berjuang melawan penjajah dan ikut mendorong kemajuan bangsa melalui perannya sebagai ibu dan pendidik anaknya. Pada masa kemerdekaan seperti sekarang ini, perempuan telah banyak bergerak hampir di semua bidang. Namun potensi yang dimiliki perempuan sering terabaikan karena faktor budaya dan struktur yang terbentuk di lingkungan masyarakat. Dalam masyarakat tradisional, perempuan biasanya telah memanfaatkan sumber daya sekitar dan menggunakan kearifan lokal untuk bertahan dan melanjutkan kehidupannya. Namun dalam dunia modern, peran-peran tradisional tersebut tetap menjadi satu kekuatan tersendiri dalam menyikapi perubahan-perubahan yang cepat terjadi. Industri-industri kerajinan rumah, tenun, batik, jamu, makanan khas daerah, hingga perdagangan umum dan industri jasa telah menjadi satu kekuatan tersendiri bagi kaum perempuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga dan untuk

meningkatkan kualitas hidup keluarga. Perempuan terjun menjadi pengusaha dan di berbagai belahan dunia, perempuan pengusaha umumnya menjadi pengusaha yang berhasil. Keberhasilan ini karena perempuan ternyata lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalankan bisnisnya dan sama efektifnya seperti laki-laki.

Perempuan pengusaha cenderung lebih sadar akan resiko atas pertumbuhan yang cepat dan lebih memilih perkembangan usaha yang perlahan tetapi berlanjut. Bisnis yang dikelola perempuan memang cenderung lebih kecil, tetapi bukan berarti dikelola dengan manajemen asal-asalan, karena seperti diuraikan di atas perempuan pengusaha cenderung menjaga bisnisnya tidak tumbuh besar. Hamilton juga menemukan perempuan pengusaha akan berhadapan dengan berbagai permasalahan termasuk untuk mendapatkan kredit dan pengembangan usaha. Untuk alasan-alasan tertentu, perempuan pengusaha tidak memfokus untuk pengembangan usahanya, tetapi lebih pada penataan administrasi untuk kepuasannya dalam melakukan usaha. Lebih lanjut, keputusan yang diambil oleh perempuan pengusaha untuk membatasi pertumbuhan usahanya harus dilihat sebagai pandangan yang lebih luas daripada hanya melihat pada masalah pembiayaan, ekonomi atau pertumbuhan semata. Perempuan memiliki karakter yang lebih termotivasi oleh tujuan-tujuan yang tidak ekonomi dibandingkan laki-laki, oleh sebab itu mereka kurang agresif dan tidak terlalu melihat pada strategi pertumbuhan usaha. Perempuan pengusaha juga cenderung untuk melakukan bisnis dan urusan rumah tangga bersama-sama. Mungkin ini merupakan hal yang logis sebagai konsekuensi sebagai seorang ibu tentu menghendaki adanya keseimbangan antara pekerjaan di rumah dan di perusahaan. Apalagi dalam budaya

patriarkhi, tentu peran perempuan masih sering dibedakan dan dipisahkan. Potensi tersebut di atas menyangkut perempuan sebagai individu dan pengusaha. Dari sisi koperasi, koperasi wanita juga mempunyai keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan koperasikoperasi lainnya. Itu sebabnya sebutan koperasi wanita, yang dianggap sudah terlanjur diberikan dan melekat pada koperasi yang dikelola oleh perempuan, seolaholah memiliki karakter dan sifat tersendiri. Sebenarnya koperasi wanita sama saja dengan koperasi-koperasi lainnya, hanya karena keistimewaannya yang dikelola dan beranggotakan paraperempuan, maka terkesan koperasi wanita menjadi lain.

Koperasi wanita yang cenderung mentaati peraturan dan melaksanakan jati dirinya berarti bahwa koperasi ini mengenal adanya nilai-nilai swadaya, tanggung jawab, demokrasi, kebersamaan, dan kesetiakawanan. Misalnya, dalam koperasi wanita, perempuan dapat melakukan pengaturan dan pengelolaan dana semaksimal mungkin bagi kepentingan anggotanya. Koperasi wanita pada umumnya sangat berpengalaman dalam aktivitas simpan pinjam yang sudah menjadi dasar dari pembentukan koperasi di kalangan perempuan. Dari sejumlah pendataan yang dilakukan beberapa lembaga diketahui bahwa koperasi wanita umumnya berawal dari kelompok arisan dan kegiatan simpan pinjam diantara anggota arisan. Dalam sejarah perkembangan perekonomian di Indonesia, koperasi memiliki peranan yang cukup berarti. Hasil studi kasus tentang koperasi memperlihatkan bahwa keberadaan koperasi tidak hanya menguntungkan pada anggota koperasi tetapi juga telah berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik untuk komunitas dimana koperasi tersebut berada. Keberadaan dan



perkembangan koperasi khususnya koperasi yang dikelola oleh wanita di Indonesia cukup menarik perhatian pemerintah karena koperasi-koperasi tersebut menunjukkan perkembangan kinerja yang baik. Koperasi wanita yang berkembang adalah koperasi yang konsisten dalam menjalankan prinsip dan nilai-nilai koperasi. Koperasi wanita pada umumnya memiliki kegiatan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan pemecahan persoalan wanita baik yang bersifat konsumtif, produktif maupun kesehatan reproduksi. Keberadaan Kopwan sangat menarik untuk dikaji karena terdapat beberapa Kopwan yang cukup berkembang seperti Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita di Surabaya secara kuantitas dan kualitas terjadi peningkatan jumlah anggota, volume usaha dan peningkatan SHU.

Keberadaan dan keberhasilan koperasi tidak dapat dilepaskan dari konsep kepercayaan (*trust*) dari anggota kepada Pengurus dan sebaliknya. Hubungan timbal balik yang demikian merefleksikan hubungan pertukaran yang sebetulnya terbentang mulai dari yang paling tidak jelas pengukurannya sampai dengan jelas pengukurannya, mulai dari yang langsung sampai ke yang tidak langsung. Kepercayaan antara koperasi dengan anggotanya terbangun jika kedua belah pihak saling memenuhi ekspektasi dari keduanya. Anggota akan percaya terhadap koperasi jika koperasi mampu memenuhi ekspektasi kebutuhan anggotanya melalui mekanisme yang memenuhi prinsip-prinsip perkoperasian yang menjadikeseepakatan. Koperasi akan dipercaya oleh anggotanya jika harapan-harapan anggotanya dapat dipenuhi tanpa membedakan apapun, termasuk perbedaan jeni kelamin. Sebaliknya koperasi ada, bertahan dan berkembang jika anggotanya memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Pemerintah memiliki komitmen yang luar biasa terhadap pentingnya peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam ketahanan perekonomian nasional. Komitmen yang demikian ditunjukkan bagaimana Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan layanan kepada UMKM ini. Lembaga lembaga peneliti dan lembaga swadaya masyarakat telah banyak melakukan kajian dan pendampingan langsung kepada koperasi wanita. Namun sayang potensi koperasi wanita belum menjadi perhatian dan fokus semua pihak. Kondisi ini kemudian direspons oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan melalui Forum Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (Forum PPEP) dan Forum Peduli Perempuan Pengusaha Mikro Indonesia (FP3MI) dengan melakukan koordinasi dan penggalangan opini tentang kemampuan perempuan pengusaha. Kemampuan perempuan pengusaha yang menjadi potensi berkembangnya koperasi wanita sekaligus menjadi target kementerian. Kementerian Negara Koperasi dan UKM telah mendorong koperasi wanita untuk lebih agresif bergerak dalam penyaluran dana bergulir melalui Program Pembiayaan Wanita Usaha Mandiri (P2WUM), program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (PERKASSA).<sup>13</sup>

Kementerian Perdagangan dan Perindustrian memiliki kegiatan pemberdayaan perempuan melalui pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kelompok perempuan dalam aspek

---

<sup>13</sup>Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, *Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan* Jakarta 2008

perdagangan dan industri. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga memberikan perhatian kepada kelompok perempuan yang dilatih untuk memproduksi dan menjalankan aktivitas simpanpinjam untuk selanjutnya dihubungkan dengan program-program yang ada dari Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Kerjasama dan koordinasi sudah mulai terjalin. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti perbankan, perguruan tinggi, dunia usaha juga perlu digalang untuk mengefektifkan pemberdayaan perempuan. Kementerian Negara Koperasi dan UKM telah menyalurkan dana-dana programnya melalui Bank Pembangunan Daerah setempat, Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri. Dengan demikian, koperasi wanita senantiasa akan berhubungan terus dengan pihak bank-bank terkait untuk memperkuat perekonomian masyarakat.

Masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang berkepanjangan. Salah satu mengatasi kemiskinan adalah dengan menjadi masyarakat yang produktif. Masyarakat agar menjadi produktif maka diperlukan usaha-usaha. Usaha tersebut salah satunya dengan diberdayakannya masyarakat khususnya perempuan. Pergeseran waktu, emansipasi, perkembangan teknologi dan pendidikan serta tuntutan zaman membuat tidak hanya laki-laki yang menjadi pencari nafkah dan dengan adanya persaingan yang ketat dalam bidang ekonomi, seorang suami saja tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga sehingga seorang ibu juga dituntut untuk mendukung penghasilan keluarga.<sup>14</sup> Kurangnya kesempatan ekonomi bagi perempuan menciptakan ketergantungan ekonomi pada suami. Ini membuat wanita sangat rentan jika sesuatu terjadi kepada suami atau pernikahan mereka. Maka dari perempuan diharapkan dapat memiliki

---

<sup>14</sup> Hetifah S. *Strategi dan Agenda Pengembangan Usaha Kecil*, Seri Penelitian Akatiga, Yayasan Akatiga, Bandung. 2015. Hal. 45

peran dalam membantu perekonomian keluarganya. Menurut Hernanik posisi kaum perempuan yang selama ini didudukan sebagai “ratu rumah tangga” dan pengendali urusan domestik, menjadi nilai yang begitu dominan dalam masyarakat, sehingga kesempatan beraktivitas di luar rumah dianggap sebagai sesuatu yang mengada-ada.<sup>15</sup> Kondisi semacam itulah yang menciptakan ketidakberdayaan perempuan sehingga menyebabkan kaum perempuan menjadi lemah dan terbatas tingkat ekonominya atau miskin. Dengan kata yang sederhana bisa dikemukakan bahwa wajah kemiskinan adalah wajah perempuan. Oleh karena itu, pendekatan pemberdayaan merupakan cara yang paling tepat untuk memecahkan masalah kemiskinan kaum perempuan. Menurut Duflo hubungan antara pembangunan ekonomi dan pemberdayaan perempuan didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan perempuan dalam hal pendidikan, kesehatan dan partisipasi politik.<sup>16</sup>

Ketidaksetaraan yang selama ini terjadi antara laki-laki dan perempuan menyebabkan kaum perempuan selalu mendapatkan diskriminasi. Kondisi perempuan akan membaik pada dua hal yaitu ketika kemiskinan berkurang, dapat meningkatkan kondisi semua orang termasuk perempuan, dan ketidaksetaraan gender menurun karena penurunan kemiskinan. Menurut Gemari salah satu kegiatan pemberdayaan perempuan yang bisa dilakukan adalah melalui usaha koperasi. Koperasi yang selama ini dikenal sebagai pilar dari perekonomian bangsa merupakan pilihan tepat bagi kaum perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga maupun

---

<sup>15</sup> Yuliana. *Koperasi Wanita Solusi Bagi Kemandirian Perempuan Pengusaha Mikro*, <http://www.yskk.org> diakses 7 November 2018

<sup>16</sup> Yuliana. *Koperasi Wanita Solusi Bagi Kemandirian Perempuan Pengusaha Mikro*, <http://www.yskk.org> diakses 7 November 2018

kelompoknya.<sup>17</sup> Apalagi, saat ini peranan pemerintah dalam melindungi koperasi dari hambatan kekuatan yang besar dan jaringan yang kokoh, sehingga memungkinkan koperasi dan anggotanya bisa hidup sejahtera. Menurut Tesfay koperasi memiliki peran kunci bagi perempuan dalam memenuhi kebutuhan dengan menyediakan akses ke kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Perempuan mendapat akses ke sumber daya umum produksi (seperti kredit, tanah, fasilitas pemasaran, infrastruktur, peralatan, teknologi) yang meningkatkan pendapatan mereka.<sup>18</sup>

Dengan membentuk diri menjadi koperasi, mereka bisa mendapatkan keuntungan dari skala ekonomi dan meningkatkan akses mereka ke pasar kerja. Menurut Maleko perempuan memiliki peran yang signifikan dalam melaksanakan banyak kegiatan ekonomi. Koperasi tampaknya menjadi instrument terbaik untuk membawa peningkatan kesejahteraan perempuan dan untuk pengembangan transformasi seperti pemikiran yang lebih terbuka bagi perempuan dengan menggunakan koperasi wanita yang dianggap paling menguntungkan.<sup>19</sup> Menurut Pratama koperasi wanita dalam awal berdirinya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari wanita dan menjadi tempat untuk memberdayakan wanita. Untuk selanjutnya koperasi wanita menjadi wadah bagi para wanita untuk membangun suatu perekonomian yang bisa meningkatkan tingkat kesejahteraan wanita dan meningkatkan taraf hidup wanita. Keberadaan koperasi wanita sangat menarik untuk dilihat karena terdapat beberapa koperasi yang cukup

---

<sup>17</sup> Kementerian Negara Pembedayaan Perempuan, *Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan* Jakarta 2018.

<sup>18</sup> Arifinal Chaniago, *Perkoperasian Indonesia*, Angkasa Bandung 2013. Hal 51

<sup>19</sup> Anniswati M. Kamaluddin. *Pikiran, Kiprah dan Perjuangannya Mengangkat Martabat Perempuan*, Intrans Jakarta, 2012.

berkembang. Hal ini dapat dilihat secara kuantitas seperti peningkatan jumlah anggota, volume usaha dan peningkatan SHU sedangkan jika dilihat dari kualitas pengelolaan, koperasi wanita lebih konsisten dan memberikan dampak positif untuk peningkatan kesejahteraan keluarga. Hal ini salah satunya dicontohkan dengan diadakannya unit simpan pinjam yang dikelola oleh wanita di beberapa Propinsi.<sup>20</sup>

Koperasi wanita merupakan wadah yang paling tepat bagi kelompok perempuan pelaku usaha yang biasa disebut kelompok produktif dalam meningkatkan usahanya. Koperasi wanita mempunyai potensi besar dalam pemberdayaan perempuan, yang kebanyakan adalah pelaku usaha kecil, yang mempunyai kelemahan dalam mengakses sumber-sumber produktif seperti bahan baku, modal, teknologi, pasar, dan informasi.<sup>21</sup> Pada bulan November Tahun 2017, Menteri Koperasi dan UKM meresmikan Kabupaten Gianyar sebagai proyek percontohan untuk program PERKASSA (Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera). PERKASSA akan mampu mengangkat perempuan dan ekonomi keluarga. Perempuan tidak pasrah terhadap kemiskinan dan ikut terlibat dalam upaya meningkatkan taraf hidup, perempuan dapat menjadi salah satu penopang ekonomi keluarga.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Anonim, *Studi Peran Wanita Dalam Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Menengah*, Badan Pengembangan Sumberdaya KPKM 2014.hal 27

<sup>21</sup>Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Semarang, 2018. Data Koperasi Wanita di Kota Semarang.

<sup>22</sup>Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Semarang, 2018. Data Koperasi Wanita di Kota Semarang.

## **Penutup**

Model pemberdayaan kopwan melalui pendekatan usaha produktif, melalui pembenahan kembali kinerja dan pengendalian usaha simpan pinjam, diharapkan dapat meningkatkan inisiatif wanita dalam berkiprah mengembangkan usaha diri dan koperasi menuju kesejahteraan bersama. Jangan sampai kopwan hanya sebagai tempat pinjaman untuk tujuan konsumsi rumah tangga tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan yang akan menyulitkan anggota dan koperasi sendiri. Pendekatan yang dilakukan menuntut kemampuan dan kemahiran profesional di bidang keuangan mikro, untuk membangun sistem pemberdayaan ekonomi kaum perempuan, memacu pengembangan usaha produktif, menumbuhkan jiwa kewira-koperasian, dan mekanisme pembentukan kopwan secara sehat. Keberhasilan Kopwan selain karena menerapkan simpan pinjam dengan sistem tanggung renteng, juga pengurus atau pengelola merupakan wanita yang profesional, ulet, tangguh, penuh strategi, memiliki jiwa wiraswasta tinggi sehingga cepat menangkap peluang usaha yang ada seperti usaha produktif pertokoan atau swalayan, kebutuhan konsumsi, persewaan, catering, wartel, voucher dan sebagainya untuk kebutuhan anggota. Yuliana menyatakan dampak usaha mikro diindikasikan membaik jika kondisi fisik rumah dan terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. Partisipasi ekonomi anggota dapat menitipkan produk untuk dijual di usaha koperasi. Peran Kopwan lainnya dalam pemberdayaan perempuan antara lain memberikan pelatihan, konsultasi usaha, peningkatan keterampilan baik dalam hal teknis usaha seperti organisasi, manajemen, administrasi usaha, maupun peningkatan kualitas produk, akses kepada sumber-sumber produktif.

## **Daftar Pustaka**

- Anniswati M. Kamaluddin. *Pikiran, Kiprah dan Perjuangannya Mengangkat Martabat Perempuan*, Intrans Jakarta, 2012.
- Arifinal Chaniago, *Perkoperasian Indonesia*, Angkasa Bandung 2013
- Anonim, *Studi Peran Wanita Dalam Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Menengah*, Badan Pengembangan Sumberdaya KPKM 2011.
- Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Semarang, 2011. Data Koperasi Wanita di Kota Semarang.
- Hetifah S. *Strategi dan Agenda Pengembangan Usaha Kecil*, Seri Penelitian Akatiga, Yayasan Akatiga, Bandung. 2015
- Hanel Alfred, *Organisasi Koperasi. Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Organisasi Koperasi dan Kebijakan Pengembangan di Negara-Negara Berkembang*. Graha Ilmu Yogyakarta 2015.
- Indah Anisykurlillah, Lyna Latifah, *Model Pemberdayaan Koperasi Wanita sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. 2017
- Imam Cahyono, *wajah kemiskinan, wajah perempuan*, jurnal perempuan No. 42, Yayasan Jurnal Perempuan Juli 2015
- Kamla Bhasin, *Memahami Gender*. Teplok Press, Jakarta 2011
- Kamla Bhasin dan Nighat Said Kelana Khan. *Persoalan pokok mengenai feminisme dan relevansinya*, alih bahasa S, Helina, PT, Gramedia Pustaka Utama 2011
- Kementerian Negara koperasi dan UKM RI. *Kumpulan Kebijakan Bantuan Perkuatan dan Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Konvensional*. Jakarta 2011
- Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI, *Laporan pendataan Kopersi wanita yang Responsif Gender* Jakarta, 2018
- Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI, *Pembentukan koperasi dan kelompok* .Jakarta 2007
- Kementerian Negara Pembedayaan Perempuan, *Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan* Jakarta 2009



- Robert J Kilber Kittie W Watson. Katty J Whalers Larry, L Barker, *Groups in Process An Introduction to Small Group Communication*. Prentice-Hall, Inc. Engewood Cliffs. New Jersey 2012.
- Semaun, Syahriyah. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa*. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 2016, 14.1: 108-124.
- Sudirman, L.; Damirah, Damirah; Budiono, I. Nyoman. *Pengembangan Minat Berwirausaha Pada Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare*. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 2018, 16.1: 16-31.
- Syahriyah Semaun, *Eksistensi Koperasi Wanita Dalam Menghadapi Era Globalisasi*. Jurnal Al-Mai'iyah. Volume 03 No. 1 Oktober 2010
- Winardi J., *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2013
- Yuliana. *Koperasi Wanita Solusi Bagi Kemandirian Perempuan Pengusaha Mikro*, <http://www.yskk.org> diakses 7 November 2018
- Zubair, Muhammad Kamal. *Prospek Program Studi Perbankan Syariah*. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 2018, 16.1: 32-50.